

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana perilaku partai politik dalam pengusungan pasangan calon Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020. Karakteristik partai politik menjadi penting karena disatu sisi dia menjadi penghubung dalam sistem pemerintahan antara publik dengan pemerintah, disisi lain partai politik juga penting dalam keikutsertaannya di pemilu karena representasi publik. Miriam Budiardjo mengatakan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dengan pemerintah di pihak lain.¹Di Negara-negara totaliter, partisipasi rakyat didasari dengan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik.²

Dalam partai politik terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai partai politik di Negara demokratis dan otoriter. Pandangan tersebut dapat berimplikasi pada pelaksanaan tugas dan fungsi partai di setiap masing-masing Negara. Disini peneliti akan menjelaskan salah satu fungsi partai politik di Negara demokrasi yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, dalam hal ini yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang berbakat untuk berpartisipasi dalam

¹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 159.

²*Ibid.*, hlm. 159-160.

proses politik.³ Pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik adalah dengan melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lainnya; juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader di masa mendatang yang akan mengganti pimpinan lama.⁴

Partai politik dianggap sebagai salah satu sarana terpenting untuk mencapai demokrasi nasional. Tidak dapat disangkal bahwa partai politik merupakan pilar demokrasi. Demokrasi tidak dapat berfungsi dan berjalan tanpa partai politik, atau dapat dikatakan bahwa berjalannya dan berfungsinya kehidupan dalam Negara demokrasi sangat bergantung pada keberadaan partai politiknya.

Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu yang akan dibahas. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*)⁵ maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. A. Sudiharto Djiwandono

³Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta: PT. Gramedia, 1981), hlm. 16.

⁴Miriam Budiardjo, Op.Cit., hlm. 164.

⁵Istilah terminologis ini diungkapkan oleh Abraham Lincoln (1808-1865), Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Lihat A.A. Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 190.

mengemukakan pendapatnya bahwa pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting; ia merupakan perwujudan nyata keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.⁶Pada kenyataannya suatu pemilihan umum akan dapat terselenggara hanya dengan adanya partai-partai politik. Di mana hal ini partai-partai politik berkedudukan sebagai kontestan pemilihan umum.

Setiap pemerintahan yang mengaku demokratis hendaknya mampu menyelenggarakan pemilu secara demokratis pula karena pemilu demokratis merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi modern. Disini peneliti akan menjabarkan salah satu fungsi dari pemilu yaitu, sebagai sarana rekrutmen politik. Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.⁷Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga lembaga yang ada. Oleh karena itu, fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik. Sarana rekrutmen politik tidak hanya berkaitan dengan pemilu saja. Dalam partai politik sarana rekrutmen politik juga sangat penting.

Peraturan perundang-undangan tentang partai politik terdapat hal yang menarik untuk dikaji adalah pasal yang mengatur tentang fungsi dari partai politik tersebut khususnya fungsi rekrutmen politik. Di panggung perpolitikan di Indonesia, keberadaan partai politik mengalami perkembangan yang pesat dari segi jumlah, dan ideologi yang diusung. Akan tetapi jumlah Parpol yang banyak

⁶A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan Umum dan Pendidikan Politik*, dimuat dalam *ANALISA*, No.3, Maret 1983, CSIS Jakarta, hlm.201.

⁷Cholisin, dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2007), hlm. 113.

tersebutnya terlihat ada jika akan terjadi event-event kenegaraan seperti Pemilu, Pilpres dan Pilkada. Pada saat menjelang event partai politik kelihatan sangat sibuk. Partai politik sibuk untuk mencari sosok yang akan diusung. Demi dapatnya sosok yang akan diusung, partai politik melakukan lobi-lobi dan manuver-manuver politik. Problematika lain yang sering terjadi dalam parpol yaitu banyaknya kader yang korupsi dan tidak menjembatani sistem politik antara publik dengan Negara.

Kesibukan-kesibukan itu dikarenakan lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik. Sehingga ketika akan mempersiapkan calon pejabat yang akan dipilih oleh masyarakat Parpol tidak punya calon yang dipersiapkan melalui proses pengkaderan. Tidak terdapatnya sistem kriteriaisasi calon. Akhirnya yang terjadi adalah munculnya calon-calon karena faktor-faktor tertentu seperti faktor ketokohan, pengaruh “dinasti politik” dan “mahar politik”. Di satu sisi partai politik juga menghadapi maraknya fenomena “naturalisasi” kader partai politik dari satu partai ke partai lain sebagai akibat lemahnya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi tersebut yang memprihatinkan.⁸

Lemahnya rekrutmen politik oleh partai politik menyangkut juga masalah *fundraising* (pengumpulan dana). Ketika sebuah partai menghadapi krisis dalam hal pendanaan maka kemungkinan segala macam cara akan dilakukan termasuk dengan menggadaikan ideologi partai, hal ini dikarenakan biaya Pemilu yang mahal, maka jalan satu-satunya partai politik memanfaatkan kadernya yang memiliki posisi strategis dalam jabatan politik untuk

⁸ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.197

mengumpulkan dana secara ilegal dan berusaha untuk menjadikannya seolah-olah legal. Tidak heran jika ada institusi atau badan usaha Negara yang disebut sebagai ‘sapi perah’. Realitas tersebut tentunya sangat mengancam keuangan negara dan menjelekan citra partai politik yang bersangkutan.⁹

Beberapa gejala seperti kecenderungan partai-partai hanya menjadikan pemilu sebagai ajang untuk memperoleh dan berbagi kekuasaan. Akibatnya kurang berfungsinya partai oposisi sebagai penyeimbang bagi partai yang sedang berkuasa. Terkadang juga demi kekuasaan, partai politik melakukan apa saja seperti aksi “perselingkuhan” di antara mereka demi kepentingan pragmatis. Untuk itu menurut Kuskridho gejala tersebut memperlihatkan gejala yang disebut dengan politik kartel.¹⁰ Aturan mengatur fungsi rekrutmen politik dilakukan berdasarkan AD/ART partai politik yang bersangkutan. Akan tetapi kenyataannya hampir semua partai politik tidak mengatur pelaksanaan rekrutmen politik dalam AD/ART partai mereka akibatnya rekrutmen politik selama ini dilakukan secara pragmatis atau sesuai dengan kehendak atau keinginan dari elit parpol.

Dari berbagai persoalan yang terjadi, permasalahan fungsi partai politik menjadi salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji. Terwujudnya konstruksi demokrasi yang kokoh dan stabil membutuhkan pelebagaan politik yang mantap, salah satunya adalah adanya partai politik. Demikian halnya pada pilkada langsung, partai politik masih memegang peran penting. Dimana, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

⁹Ibid, hlm.200-201

¹⁰Ibid, hlm.182

Daerah, pasangan kepala daerah dan wakilnya diajukan oleh partai politik. Tentunya, partai politik diharapkan tidak hanya berfungsi dan berkompetisi meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Sebaliknya, partai politik juga dituntut mampu menjalankan fungsi yang lain seperti agregasi kepentingan masyarakat, artikulasi kepentingan, sosialisasi politik, dan pengatur konflik. Sehingga, pilkada langsung tidak hanya sebatas media rotasi kekuasaan antar elit dan partai politik, tetapi juga menjadi media pendidikan politik yang efektif bagi masyarakat. Mencermati persoalan di atas, yang dianggap menarik untuk diteliti lebih mendalam adalah perilaku partai politik dalam pilkada langsung.

Provinsi Sumatera Utara menggelar pilkada serentak di 23 Kabupaten/Kota. Pilkada sebagai bagian dari perbaikan proses pasca era reformasi merupakan penguatan dan pendalaman demokrasi serta suatu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia diadakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 270 daerah. Pada pilkada 2020 terdapat 25 daerah yang memiliki pasangan calon tunggal. Munculnya fenomena calon tunggal menjadi pertanyaan terkait dengan peran partai politik serta perkembangan demokrasi di tingkat lokal. Fenomena pasangan calon tunggal terjadi karena beberapa faktor yaitu: pertama, keberadaan calon tunggal sebagai suatu akibat dari dua pihak yang saling berkepentingan antara petahana dan partai politik dimana petahana berkepentingan untuk menjaga *status quo*, tetap berkuasa dengan cara menjegal saingan lewat “borong partai” sedangkan partai politik berkepentingan untuk menang dan mengangkat petahana karena memiliki elektabilitas tinggi. Kedua,

partai gagal melakukan kaderisasi serta terjadi krisis kepemimpinan di daerah. Ketiga, keberadaan calon tunggal tidak terlepas dari syarat untuk mengusung kandidat baik melalui jalur partai politik atau jalur independen.

Salah satu wilayah yang tercatat dalam fenomena kotak kosong/kolom kosong terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara pada Pilkada Tahun 2020. Di Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri, diikuti oleh pasangan calon tunggal yaitu Dosmar Banjarnahor dan Oloan Panieran Nababan yang diusung oleh seluruh partai pemilik kursi di DPRD sebanyak 25 kursi dengan rincian:¹¹

Tabel 1.1

**Hasil Rekapitulasi Kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
Periode 2020-2024**

| Nama Partai | Jumlah Kursi |
|-------------|--------------|
| GERINDRA | 2 kursi |
| PDIP | 7 kursi |
| GOLKAR | 5 kursi |
| NASDEM | 3 kursi |
| PERINDO | 2 kursi |
| PSI | 1 kursi |
| HANURA | 4 kursi |
| DEMOKRAT | 1 kursi |

¹¹<https://news.okezone.com/read/2020/09/05/608/2273221/perindo-dukung-petahana-dosmar-banjarnahor-di-pilkada-humbang-hasundutan>

Aksi borong partai telah nyata mencederai asas pelaksanaan Pilkada serentak yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adanya ruang terhadap transaksi politik serta membatasi warga negara dalam mencari dukungan dari partai politik. Bagi pasangan calon yang memiliki financial besar bisa saja membeli dukungan dari semua partai politik di DPRD.

Melihat fenomena di Kabupaten Humbang Hasundutan, terdapat beberapa aksi borong partai. Hal tersebut terlihat dari salah satu wawancara bakal calon bupati yang mengatakan bahwa pada awalnya terdapat tiga partai pengusung yang hendak mencalonkan pasangan calon bupati-calon wakil bupati antara lain, Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Nasdem. Namun, setelah terjadi dinamika politik antara pasangan calon Bupati dengan DPP seluruh partai koalisi yang kemudian keputusan seluruh DPC partai koalisi berubah, satu persatu partai menarik dukungannya dari calon tersebut kemudian beralih mendukung petahana sehingga seluruh partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sepenuhnya mendukung petahana.

Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor Oloan Paniaran Nababan sebagai calon tunggal menjadi pemenang berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan suara.

Tabel 1.2

Hasil Rekapitulasi Suara

| No | Nama | Jumlah suara |
|----|---|--------------------|
| 1 | Dosmar Banjarnahor dan Oloan Paniaran Nababan | 51. 799 (52,5%) |
| 2 | Kotak Kosong | 46. 941 (47,5%) |

Sumber: KPUD Kabupaten Humbang Hasundutan 2020

Kotak kosong berhasil menang di tiga kecamatan antara lain: Kecamatan Dolok Sanggul sebanyak 12.881 suara, Kecamatan Pakkat sebanyak 7.335 suara, dan Kecamatan Parlilitan sebanyak 5.853 suara.

Dari beberapa masalah diatas Peneliti melakukan beberapa kajian awal untuk menemukan permasalahan yang dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, menurut jurnal politik yang ditulis oleh Ilham dan Titin Purwaningsih yang berjudul: “Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Dalam Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Walikota Makassar 2018.” Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode campuran. Metode campuran merupakan pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan data kualitatif. Dalam pengumpulan data, penelitian ini dilakukan turun langsung kelapangan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang berada dilokasi penelitian dan wawancara langsung kepada informan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat menangnya kotak kosong terhadap calon tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menangnya kotak kosong dalam pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 karena ketidakpercayaan masyarakat yang sebagai pemilih kepada calon tunggal yang dianggap sebagai pendatang/wajah baru.

Sebagai bentuk kecerdasan masyarakat kota Makassar dalam berdemokrasi yang dianggap mampu mengurangi terjadinya politik uang. Kemudian bentuk kejenuhan masyarakat terhadap partai politik yang hanya

mengusung satu pasangan calon sehingga dianggap tidak mampu menghadirkan kandidat calon sebagai representatif ketika hanya satu pasangan calon. Kemudian adalah pertarungan antara kekuatan kecerdasan masyarakat kota Makassar sebagai pemilih melawan oligarki politik.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan penelitiannya terhadap perilaku pemilih dalam menyikapi kemenangan kotak kosong pada pemilihan walikota Makassar 2018 dengan melakukan 3 pendekatan yang terdiri dari pendekatan sosiologis, psikologis dan pilihan rasional. Sementara dalam proposal ini, peneliti lebih memfokuskan penelitiannya terhadap perilaku partai politik dalam pilkada Humbang Hasundutan provinsi Sumatera Utara tahun 2020. Penelitian oleh Ilham dan Titin Purwaningsih berlokasi di Kota Makassar. Sedangkan peneliti, mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Humbang Hasundutan provinsi Sumatera Utara.

Kedua, penelitian yang sejalan juga dilakukan oleh Joko Pitoyo yang berjudul “Perilaku Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (studi Kota Batu).” Penelitian oleh Joko Pitoyo dilakukan di Kota Batu bertujuan untuk mendiskripsikan tentang perilaku partai politik, mengidentifikasi orientasi-orientasi dibalik berbagai tindakan dan aktivitas partai politik tersebut, dan memberikan prediksi tentang kecenderungan perilaku partai politik di Indonesia di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian bahwa parpol masih terfragmentasi ke dalam beberapa ideologi. Ideologi berpengaruh pada sifat parpol tetapi belum berpengaruh pada perilaku parpol. Hal ini dibuktikan dengan munculnya fenomena koalisi parpol yang seharusnya tidak dapat disatukan secara ideologis. Kemudian mekanisme organisasi dan proses pengambilan keputusan parpol dalam pilkada langsung Kota Batu dilakukan berdasarkan sistem hierarki organisasi yang di dalamnya menggunakan jalur yang tidak seharusnya dijalankan, seperti rekomendasi dari DPP. Orientasi parpol terlibat dalam pilkada langsung dilatarbelakangi motivasi kepentingan pragmatis dan materialis. Sedangkan fungsi parpol didominasi fungsi rekrutmen politik terutama untuk mengusung calon Walikota-Wakil Walikota Batu.

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah segi lokasi dan pihak yang terlibat dalam permasalahan penelitiannya. Penelitian oleh Joko Pitoyo merupakan perilaku partai politik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung (studi Kota Batu). Sementara dalam proposal ini, peneliti melakukan analisis perilaku partai politik dalam pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

Melihat permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Humbang Hasundutan provinsi Sumatera Utara. Hal ini bagi penulis sangat menarik dan unik untuk diteliti dikarenakan partai politik yang terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak melakukan fungsinya dengan baik. Sehingga pada pilkada di Kabupaten Humbang tahun 2020 hanya diikuti satu kandidat saja dan munculnya fenomena kotak kosong. Berasal dari

latar belakang masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perilaku Partai Politik Dalam Pengusungan Pasangan Calon Dosmar-Oloan Pada Pilkada Serentak Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

Bagaimana perilaku partai politik dalam pengusungan pasangan calon Dosmar-Oloan pada pilkada serentak Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dirumuskan tentang perilaku partai politik tersebut, maka tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai agar penelitian ini dapat bermanfaat. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui dan menganalisis perilaku partai politik dalam pengusungan pasangan calon Dosmar-Oloan pada pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, pada penelitian ini juga memberikan manfaat kepada sebuah bidang yang membutuhkan referensi dalam penulisan yang berkaitan selanjutnya. Untuk itu dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis mengenai perilaku partai politik dalam pencalonan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pemikiran, dan informasi, bagi penulis sendiri maupun pihak lain khususnya bagi perkembangan ilmu politik dan menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perilaku partai politik dan pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

1.5 Landasan Teori

1. Teori Kandidasi Partai Politik

Partai politik menurut Carl J. Friedrich didefenisikan sebagai sekelompok manusia terorganisir secara stabil yang bertujuan merebut ataupun mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materil.¹² Defenisi lain juga diungkapkan oleh Sigmund Neumann yang mendefenisikan bahwa partai politik merupakan organisasi dari aktivis-aktivis politik dan berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan ataupun golongan lainnya dengan pandangan berbeda.¹³

¹²Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 148.

¹³Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 404

Secara umum partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Fungsi utama dari partai politik ini sendiri adalah untuk mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan tiga hal yaitu, menyeleksi calon-calon, setelah calon-calon partai terpilih selanjutnya adalah melakukan kampanye, setelah kampanye dilaksanakan dan calon terpilih dalam pemilihan umum selanjutnya yang dilakukan partai adalah melaksanakan fungsi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif.¹⁴

Peran partai politik dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah adalah menghadirkan calon pemimpin daerah yang kredibel. “Hal tersebut menjadi salah satu upaya pencapaian tujuan dari demokratisasi lokal terutama dalam mendorong lahirnya pemerintah yang *accountable*, *responsible* dan *transparent*.” Dalam proses elektoral, partai dituntut bukan hanya mempersiapkan kader-kader terbaik untuk diuji keterpilihannya dihadapan publik, namun juga melakukan tahap-tahap kandidasi sesuai dengan peraturan yang ada dengan basis hukum dan etika publik yang berlaku.¹⁵

“Partai memiliki kedudukan yang utama dan pertama dalam proses pencalonan pada pemilihan kepala daerah karena partai menjadi saluran untuk menominasikan individu yang dianggap sejalan dengan gagasan maupun

¹⁴Labolo Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 15

¹⁵Iqbal fajar Dwiranda, *Kandidat Problematika dalam Pilkada Serentak 2015-2018: Celah Hukum Pilkada Hingga Prngmatisme Partai Politik*, (Jurnal Transformative Universitas Brawijaya, Malang: Vol.6 No.2, 2020), hlm. 241

ideologi politiknya”.¹⁶Berkaitan dengan hal tersebut, partai politik tentu memiliki kewajiban untuk memastikan calon terbaik yang diikutsertakan dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk jadi pilihan masyarakat. Sebab, mengusung calon yang tidak layak sama halnya dengan melakukan kebohongan publik.

Perubahan paradigmatis penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah awalnya melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian beralih secara langsung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan peran partai politik sebagai arena Pemilihan Kepala Daerah. Dalam artian, partai politik menjadi satu-satunya institusi dengan keistimewaan dalam hal pengajuan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hanya melalui partai politik seorang dapat menjadi kandidat dan berkompetisi dalam pemilihan. Meskipun pada akhirnya terdapat revisi bahwa calon kepala daerah dimungkinkan maju tidak hanya melalui jalur partai melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada kenyataannya partai politik terbukti masih begitu dominan dalam proses pencalonan kandidat. Melalui hal itu, partai politik menjadi institusi yang diharapkan mampu untuk memastikan kemunculan calon-calon dengan integritas yang tinggi dan berhasil melahirkan pejabat-pejabat publik sesuai harapan masyarakat melalui pilkada.¹⁷

Dalam beberapa kasus di Indonesia, “bahwa kepala daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik

¹⁶*Ibid.*, hlm. 243

¹⁷*Ibid.*, hlm. 244

ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota banyak berasal dari kalangan artis, atlet atau orang-orang yang bukan merupakan kader partai”.¹⁸Hal ini sebenarnya untuk merespon bahwa partai politik sampai saat ini masih sangat pragmatis dalam menempatkan anggotanya untuk menduduki posisi-posisi politik baik dilembaga legislatif maupun sebagai pejabat publik.

Persoalan utama kemudian mengarah bagaimana proses kandidasi oleh partai dilakukan secara pragmatis. Terdapat beberapa penjelasan mengenai ini, namun salah satunya adalah “kegagalan kaderisasi yang dilakukan oleh partai yang cenderung membuat partai memilih jalan pintas dengan mencalonkan kandidat dengan potensi kemenangan tinggi walaupun dengan mengabaikan rekam jejaknya”.¹⁹Hal ini tidak dilepaskan fakta bahwa tahap kandidasi pemilihan kepala daerah di Indonesia memang masih cukup roblematis.

Mada Sukmajati menjelaskan bahwa untuk mekanisme kandidasi, tahapan penetapan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah umumnya masih bersifat tertutup. Pada tahapan tersebut anggota partai dan masyarakat umum tidak dapat mengikuti proses yang diselenggarakan. Hampir sama dengan pemilhan Presiden dan pamilihan Legislatif, tahapan penetapan calon untuk Pemilihan Kepala Daerah seolah menjadi ruang yang gelap. Pada konteks itu praktek-praktek politik transaksional biasanya bekerja antara kandidat dan selektorat. Pada tahapan itu pula siapa mendapat apa kemudian dinegosiasikan.²⁰Berdasarkan beberapa kasus, bahkan ketua umum partai politik

¹⁸Muryanto Amin, *Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik*, (Medan: USU Press, 2018), hlm. 90

¹⁹*Ibid.*, hlm. 243

²⁰*Ibid.*, hlm. 243

dan pengurus partai politik ditingkat pusat juga terlibat dalam proses negosiasi tersebut. Tidak jarang, keputusan-keputusan kontroversial dari pengurus partai politik ditingkat pusat kemudian dibuat. Selain itu, proses kandidasi partai hanya mempertimbangkan potensi tinggi dan menguntungkan juga berpengaruh hal ini. “Bagi partai, mereka yang memiliki sumber daya politik seperti kekuasaan, dana atau jaringan dilihat sebagai potensi keunggulan tersendiri”.²¹

Secara sederhana terdapat enam hal penting dalam menunjukkan partai politik dalam menentukan calon yang diusung. Pertama, terkait siapa kandidat dapat dinominasikan. Kedua, siapa yang akan melakukan seleksi. Ketiga, dimana kandidat tersebut diseleksi dan keempat, bagaimana selanjutnya kandidat diputuskan. Apabila proses ini berjalan dengan benar sesuai prosedur maka akan diperoleh kandidat yang berkualitas dan kompeten dari partai politik.²²

Realitas politik kontemporer menunjukkan dengan jelas bahwa kehadiran partai politik di Indonesia tidak otomatis berkontribusi positif terhadap sistem politik yang demokratis pula. Robert Michels, menyatakan bahwa “organisasi politik yang berskala besar seperti partai politik, cenderung dikelola secara oligarkis lebih melayani kepentingan sendiri dari kepentingan organisasi”.²³ Keberadaan dan perkembangan partai politik pasca reformasi belum menunjukkan eksistensi sebagai sebuah institusi public yang memiliki

²¹Iqbal Fajar Dwiranda, *Op. Cit.* hlm. 242

²²Amir Syamsuadi, *Model Kandidasi Birokrat Oleh Partai Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015*, (Jurnal Of Governance Universitas Abdurrad, Pekanbaru: Vol.3 No.2, 2018), hlm.138.

²³Muhammad Ruslan, *Demokrasi dan Transparansi Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Rekrutmen Caleg Pada Pemilu 2019*, (Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, Surabaya: Vol.2 No. 2, 2020), hlm. 129

tanggung jawab terhadap masyarakat pemilihnya. Partai politik hingga kini belum memperlihatkan akuntabilitas, transparansi dan demokrasi baik kepada konstituen maupun anggota atau kadernya. Partai politik di Indonesia saat ini lebih memilih kepentingan politik sendiri dibanding kepentingan organisasi dan partai cenderung tidak transparan serta tidak demokrasi terhadap kader maupun anggota partai nya sendiri, hal itu dikarenakan partai dikelola secara oligarkis.

Menurut Sulaeman, partai politik pada era reformasi juga terjebak dalam bentuk oligarkis dalam proses pengambilan keputusan strategis. “Kecenderungan selama ini menunjukkan pengambilan keputusan partai politik bersifat tertutup dan hanya ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai saja”.²⁴ Keputusan tertinggi biasanya berada pada seorang atau sekelompok kecil elit partai saja. Persoalan mekanisme internal partai dalam pembuatan keputusan dicirikan dengan sentralisasi dalam pengambilan keputusan. Peran pengurus pusat masih dominan dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah. Selain itu, jika digunakan parameter personalisasi ini untuk menilai, kondisi partai-partai politik ditanah air saat ini, tentu banyak sekali partai politik yang belum melembaga secara *depersonalized*. Hasilnya, partai politik tidak benar-benar menjaring aspirasi dari bawah tentang calon yang diharapkan masyarakat, melainkan berdasarkan kepentingan pragmatis sekelompok elit saja.

Meskipun sebagian partai politik memiliki prosedur seleksi calon anggota, legislatif yang baku, namun justru pimpinan partai politik sendiri melanggar prosedur seleksi kandidat yang telah disepakati bersama tersebut.

²⁴*Ibid.*, Hlm. 130

Jadi, meskipun ada prosedur baku yang dimiliki parpol dalam seleksi kandidat legislatif, namun seringkali prosedur tersebut berhenti sebagai dokumen tertulis belaka. Sementara itu, problem lain terkait rekrutmen calon pejabat publik adalah relatif belum terlibatnya anggota partai dalam seleksi kandidat, baik untuk pileg maupun untuk pasangan calon dalam pilpres dan pilkada.²⁵

Terdapat model kandidasi dari Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat yang terbagi atas tiga tahapan, diantaranya:²⁶

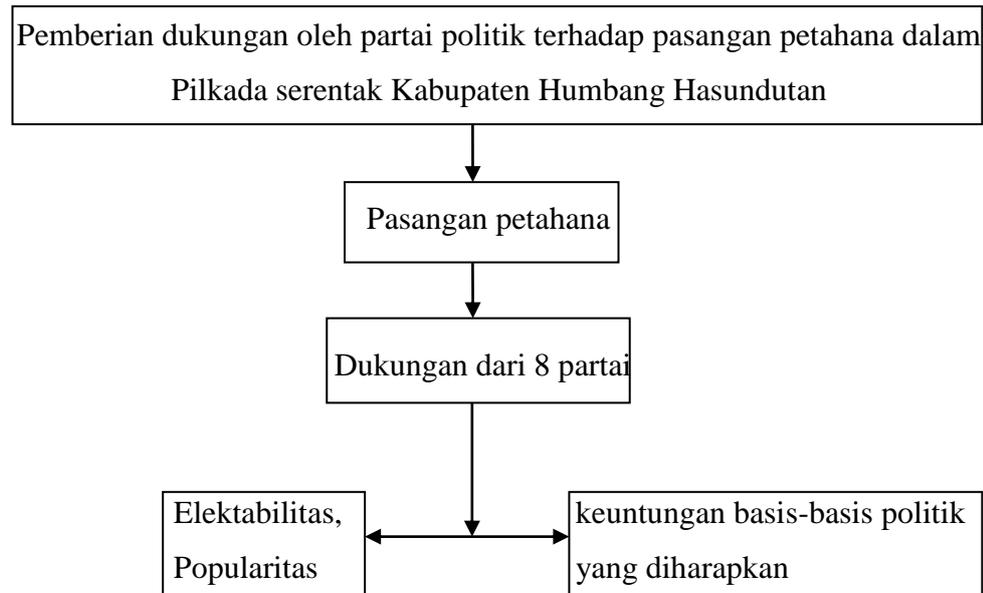
- 1 Pendaftaran kandidat. Pada tahapan pertamaini, tim pemilihan yakni para pengurus dari partai politik akan melakukan penyaringan kandidat. Tahapan ini masih bersifat eksklusif, tim menetapkan para kandidat setidaknya dua kali kursi yang telah disediakan Seleksi kandidat.
- 2 Pada tahapan kedua, partai politik melakukan readopsi dan deseleksi. Readopsi yakni merubah daftar kandidat yang diajukan pada tahapan pertama secara terbatas. Deseleksi yakni menyetujui ataupun menolak kandidat petahana yang diajukan pada tahapan pertama.
- 3 Penetapan kandidat. Pada tahapan ketiga, partai politik menetapkan daftar akhir para kandidat yang akan diusung. Berkaitan dengan hal ini, partai politik melibatkan semua anggota dalam sebuah konvensi sesuai dengan tingkatan pemilu. Dalam tahapan penetapan kendidat ini bersifat inklusif.

²⁵*Ibid.*, Hlm. 131

²⁶*Ibid.*, Hlm. 159

1.6 Kerangka Pikir

Adapun kerangka berpikir dari Analisis Kandidasi Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020.



Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat dilihat bahwa keterpilihan calon kandidat tunggal dalam pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 tidak terjadi begitu saja melainkan melalui banyak dinamika mulai dari sifat partai politik elektoralis dimana partai orientasinya hanya menang atau kalah. Kemudian syarat calon yang ditetapkan partai, disini partai dapat melihat elektabilitas, popularitas dan akseptabilitas calon sehingga kemudian antara calon dan partai terjadi kontrak politik dimana di tahap ini terjadi pertukaran ekonomi politik. Tahap terakhir penyaringan oleh partai politik, tentu calon yang paling menguntungkan dan memiliki peluang besar untuk menang yang akan

dipilih oleh partai politik sebagai kandidat calon dalam pilkada serentak Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.²⁷ Peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan yaitu, jenis penelitian, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Pemilihan dalam suatu rancangan penelitian juga perlu didasarkan pada masalah penelitian yang diteliti.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan dengan adanya data-data yang didapatkan nantinya berupa kata-kata maupun tulisan, untuk mengetahui serta memahami suatu fenomena secara rinci, mendalam, dan menyeluruh. Karakteristik dari penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar,

²⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Alfabeta(Bandung:Alfabeta, 2010), hlm 2.

sehingga tidak menekankan pada angka.²⁸Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana perilaku partai politik dalam Pilkada Bupati Humbang Hasundutan tahun 2020.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara karena dalam Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 diikuti oleh pasangan calon tunggal, sementara terdapat banyak partai politik yang menduduki kursi DPRD jadi lokasi ini sesuai dengan indicator penelitsn ini. Sehingga memudahkan peneliti untuk mencari dan memperoleh informasi maupun data untuk keperluan penelitian ini.

1.7.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti yaitu perilaku partai politik dalam Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020. Maka peneliti memfokuskan permasalahan yang akan diteliti hanya di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan pokok dari mana data dapat diperoleh.Sumber data digolongkan menjadi dua bagian yaitu data sekunder dan data primer. Adapun penjelasan dari kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut²⁹

²⁸*Ibid.*

²⁹Jhon W. Creswell, "RESEARCH DESIGN Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran" Edisi VI (Yogyakarta Pustaka Belajar, 2016), hal. 248.

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (responden) atau data pokok yang didapatkan dilapangan, instrumen yang digunakan oleh peneliti yaitu pedoman wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak langsung yang dapat berupa buku, catatan, bukti yang telah ada yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan adalah metode yang digunakan atau yang dipakai oleh penelitian kualitatif untuk menentukan siapa yang akan dijadikan sumber data. Yang dalam hal penelitian kualitatif tidak mengenal sampel, maka penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan seseorang dengan objek penelitian yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara pada narasumber dan meninjau langsung pada lokasi penelitian. Informan adalah orang yang dapat diajak berinteraksi berkelanjutan, dan informan juga dapat memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.³⁰

Teknik penentuan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah teknik *Proposive sampling* yaitu pemilihan atau penarikan informan atau sample berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sample yang disesuaikan atau yang dianggap mengetahui tentang maksud atau tujuan atau tema peneliti. Adapun kriteria informan yang dibutuhkan pada penelitian

³⁰Ibid., 275.

ini adalah orang yang mengetahui dan memiliki keterkaitan pada pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020.

Tabel 1.3

Informan Penelitian

| No | Lembaga | Jumlah | Alasan |
|----|---------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Sekretaris partai PDIP | Kepler Torang Sianturi | Merupakan partai yang mengusung paslon Bupati dan meraih 7 kursi di DPRD. |
| 2 | Sekretaris partai GOLKAR | Parulian Simamora | Merupakan partai yang pengusung paslon Bupati dan meraih 5 kursi di DPRD. |
| 3 | Sekretaris partai NASDEM | Bernard Gabriel Samosir | Merupakan partai yang pengusung paslon Bupati dan meraih 3 kursi di DPRD. |
| 4 | Sekretaris partai HANURA | Bernando Sihotang | Merupakan partai yang pengusung paslon Bupati dan meraih 3 kursi di DPRD. |
| 5 | Ketua partai GERINDRA | Saut P. Simamora | Merupakan partai pengusung paslon Bupati dan meraih 2 kursi di DPRD. |
| 6 | Sekretaris partai PERINDO | Guntur Sariaman Simamora | Merupakan partai pengusung paslon Bupati dan meraih 2 kursi di DPRD. |
| 7 | Sekretaris partai PSI | Leonardus Sitinjak | Merupakan partai pengusung paslon Bupati dan meraih 1 kursi di DPRD. |
| 8 | Ketua partai DEMOKRAT | Bresman Sianturi | Merupakan partai pengusung paslon Bupati dan meraih 1 kursi di DPRD. |
| 9 | Pengamat Politik | MPR Manullang | Merupakan aktivis Tapanuli Utara yang mengetahui dinamika politik yang terjadi di Humbang Hasundutan |
| 10 | Mahasiswa UNIMED | Abizer Tumanggor aktivis dari | Merupakan mahasiswa yang berasal dari Humbang Hasundutan yang |

| | | | |
|----|------------|---------------------------------------|---|
| | | organisasi Aliansi Masyarakat Kampus. | mengetahui dinamika politik yang terjadi di Humbang Hasundutan |
| 11 | Masyarakat | Anggiat Simanullang | Merupakan masyarakat Humbang Hasundutan yang mendukung kotak kosong |

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data digunakan dengan mengumpulkan berbagai jenis data dan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mengumpulkan informasi dilokasi penelitian. Maka dengan itu peneliti menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain³¹:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula. Untuk mendapatkan data yang diinginkan peneliti diharapkan untuk terlebih dahulu membuat pokok-pokok pertanyaan lebih dulu.³²Teknik pengumpulan data ini dimaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai objek penelitian dengan Tanya jawab secara langsung dan mendalam. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau

³¹Ibid., 245.

³²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitati dan R&D*, (Jakarta : Alfabeta, 2016) hal. 137

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama .

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian, dimana peneliti akan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian, dengan tujuan mendeskripsikan secara rinci kegiatan yang terjadi, orang yang berpartisipasi dan arti dari atau makna yang dipensasikan setiap orang terhadap Pilkada Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses mereview kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditentukan. Dokumen dapat berupa dokumen public (misalnya Koran, makalah, laporan kantor, internet) ataupun dokumen private misalnya: buku harian, surat, email dan foto selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data yaitu dengan cara melihat kembali literature atau dokumen foto-foto dokumentasi yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Bahan Audio dan Visual Kualitatif

Data ini dapat berupa foto, benda, karya seni, kaset video/ segala jenis suara. Ini juga mencakup teknik pengumpulan data kreatif yang termasuk dalam kategori etnografi visual dan termasuk kisah hidup narasi visual metaforis dan arsip digital.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data digunakan untuk memperoleh data akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian. Sehingga memungkinkan temuan dari peneliti dapat tersajikan dan di informasikan kepada orang lain, Analisis data diawali dengan penelusuran dan pencarian catatan pengumpulan data, dilanjutkan dengan mengorganisasikan dan menata data tersebut kedalam unit-unit, memilih yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang dipelajari dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan. Langkah yang dilakukan peneliti ini antara lain:³³

1. Pengolahan Data dan Persiapan Analisis (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Sehingga perlu dilakukan pemilihan data yang relevan untuk dapat disajikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian. Setelah melakukan pemilihan data, data yang telah dipilih kemudian disederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Data yang telah disusun melalui kegiatan reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Data yang disajikan adalah data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Setelah data disajikan secara rinci, maka hal selanjutnya dilakukan adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

³³*Ibid.*, hlm. 285

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data disajikan dan telah dibahas secara rinci, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan adalah untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.7.8 Keabsahan Data/ Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan sumber data yang berbeda, memeriksa bukti dari sumber tersebut, dan menggunakannya untuk membuat argumen yang koheren tentang topik tersebut. Ketika tema dibangun dari berbagai sumber data atau perspektif dari partisipan, proses ini dapat meningkatkan validasi penelitian. Triangulasi data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menganalisis secara lengkap hasil wawancara, observasi dan dokumen.³⁴

Dalam penelitian ini, terdapat dua triangulasi data diantaranya:

1. Triangulasi Sumber yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Teknik yaitu Pengumpulan data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan bermacam-macam cara atau teknik tertentu untuk diuji keakuratan dan ketidak akuratannya.

³⁴*Ibid.*, hlm. 267